

PENGEMBANGAN KAWASAN JAGUNG BERBASIS KORPORASI PETANI DI KABUPATEN LEBAK, BANTEN

The Development of Corn Area Based on Farmer Corporation in Lebak Regency, Banten

Ika Setiasih*, Suharno, Achmad Suryana

*Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor
Jalan Raya Darmaga, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680
Korespondensi penulis. E-mail: ikasetiasih@gmail.com

Naskah diterima: 14 Juli 2020

Direvisi: 27 Juli 2020

Disetujui terbit: 20 Agustus 2020

ABSTRACT

The main problem faced by small-scale farming is that the economy of scale cannot be reached so that the use of inputs and technology is inefficient. To overcome this problem, farmers need to join and cooperate in a farming group. One of the models of this cooperation is the agricultural area development based on farmer corporation that combines technical business aspects with farmer institutions aspects. This study aims to analyze the achievements of a pilot project implementation of the corn area development based on farmer corporation in Lebak Regency, Banten Province, which analyzed using the evaluation model of context, input, process, product (CIPP) and determine priority strategies which analyzed using Analytical Hierarchy Process (AHP). The result of this study shows that the pilot project targets for the first and the second years, namely cooperation with the feed industry and forming its own feed processing, respectively have not been achieved. From the identified seven success indicators, three were achieved, namely production increase, income increase, and implementation of local specific innovative technology. The strategy that needed to be set in advance as a priority was farmer empowerment through a farmer institution, with the most important factor is farmers' welfare achievement.

Keywords: *corn development areas, evaluation model CIPP, farmer corporation, farmer empowerment.*

ABSTRAK

Masalah utama yang dihadapi usahatani skala kecil adalah tidak tercapainya skala ekonomi sehingga penggunaan input dan teknologi tidak efisien. Untuk mengatasi hal tersebut petani perlu bergabung dan bekerja bersama dalam kelompok usaha pertanian. Salah satu model kerja sama tersebut berupa pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani, yang menggabungkan aspek teknis usaha dengan aspek kelembagaan petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan proyek percontohan pengembangan kawasan jagung berbasis korporasi petani di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang dianalisis menggunakan model evaluasi *context, input, process, product* (CIPP) dan menentukan prioritas strategi pengembangan menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Hasil penelitian menunjukkan target proyek percontohan tersebut pada tahun pertama berupa kerja sama dengan industri pakan dan tahun kedua berupa pembentukan pengolahan pakan ternak sendiri belum tercapai. Dari tujuh indikator keberhasilan yang ditetapkan, tiga diantaranya berhasil dicapai, yaitu peningkatan produksi; peningkatan pendapatan; dan teraplikasinya teknologi inovatif spesifik lokasi. Strategi yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu adalah pemberdayaan petani dalam suatu kelembagaan petani, dengan faktor yang dinilai paling penting adalah tercapainya kesejahteraan petani.

Kata kunci: *korporasi petani, model evaluasi CIPP, pengembangan kawasan jagung, pemberdayaan petani.*

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi usahatani skala kecil adalah tidak tercapainya skala ekonomi dari luasan pengusahaan lahan, sehingga mengakibatkan penggunaan input dan teknologi tidak efisien. Untuk mengatasi hal tersebut petani perlu bergabung dan bekerja bersama dalam

kelompok usaha pertanian, yang menggabungkan pengelolaan sumber daya dan keputusan berusaha dalam suatu manajemen. Salah satu model kerja sama tersebut berupa pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani, yang menggabungkan aspek teknis usaha dengan aspek kelembagaan petani.

Kawasan pertanian merupakan gabungan dari sentra-sentra pertanian yang terkait secara fungsional baik dalam faktor sumber daya alam,

sosial budaya, maupun infrastruktur, sedemikian rupa sehingga memenuhi batasan luasan minimal skala efektivitas manajemen pembangunan wilayah. Pengembangan kawasan pertanian dilakukan sebagai upaya meningkatkan produksi pertanian secara efisien dan memudahkan pemasaran produk karena terkonsentrasi dalam jumlah yang banyak (Setiyanto 2013). Kementerian Pertanian (Kementan) mengidentifikasi dan mengembangkan kawasan pertanian tersebut berdasarkan empat subsektor menurut basis komoditas utama, yaitu kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Pemanfaatan lahan pertanian dan pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang mengatur agar lahan pertanian pangan terlindungi dari degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menetapkan kriteria kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Konsep pengembangan kawasan pertanian dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 jo Permentan Nomor 56/Permentan/RC.040/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian.

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan pertanian yang diinisiasi oleh Kementan memberikan hasil yang cukup baik. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kawasan meningkatkan produktivitas ubi kayu (Arianingsih 2016); mengurangi pengeluaran konsumsi pangan, meningkatkan konsumsi energi dan protein, dan meningkatkan skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai indikator kualitas konsumsi pangan beragam bergizi seimbang (BPTP Aceh 2012; Purwantini *et al.* 2012); meningkatkan kinerja dan pendapatan anggota kelompok peternak sapi potong (Kurniasari 2016). Terkait dengan pengembangan kawasan pertanian ini, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas dengan beberapa Menteri Kabinet Kerja serta Gubernur pada tanggal 12 September 2017 memberi arahan mengenai perlunya mengkorporasikan petani, dalam arti membuat kelompok besar petani agar mereka dapat berpikir dengan manajemen modern, melakukan proses agribisnis mulai dari pengadaan input, budidaya, pasca panen, pengolahan,

pengemasan, sampai dengan pemasaran hasil secara berkelompok dalam suatu manajemen usaha yang baik.

Langkah awal Menteri Pertanian menindaklanjuti arahan Presiden tersebut adalah menetapkan Permentan Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani. Dalam Permentan tersebut disebutkan bahwa arah kebijakan dan strategi pembangunan pertanian dengan pendekatan pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani (KPBKP) dimaksudkan untuk memadukan rangkaian rencana dan implementasi kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pembangunan kawasan pertanian; serta mendorong aspek pemberdayaan petani dalam suatu kelembagaan ekonomi petani agar menjadi suatu kesatuan yang utuh dalam perspektif sistem usaha tani. Dengan kata lain, pengembangan KPBKP menggunakan pendekatan baru yang menggabungkan antara aspek teknis dengan aspek kelembagaan petani.

Dalam Permentan tersebut dijelaskan kelembagaan ekonomi petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha, baik berbadan hukum maupun belum berbadan hukum. Sementara itu, korporasi petani adalah kelembagaan ekonomi petani berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal oleh petani.

Kelembagaan petani memiliki peran penting dalam pembangunan pertanian (Hermanto dan Swastika 2011). Pengembangan kelembagaan petani dapat dilakukan melalui peningkatan dukungan penyuluhan, penelitian, peran eksternal, dinamika kelompok, dan partisipasi petani (Anantayu 2009), serta dukungan karakteristik internal seperti usia produktif, pengalaman usaha tani, partisipasi aktif, motivasi dan pendidikan (Prawiranegara 2016). Penerapan korporasi petani yang sudah umum dilaksanakan adalah dalam bentuk *corporate farming*. Kelembagaan *corporate farming* dilaporkan dapat meningkatkan pendapatan petani anggota dari penyewaan lahan, membantu pengelolaan lahan, atau bagi hasil lahan (Musthofa dan Kurnia 2018). Namun demikian, belum banyak penelitian yang membahas mengenai kelembagaan petani dalam suatu kawasan pertanian.

Dalam rangka percepatan KPBKP, dibuat beberapa proyek percontohan (*pilot project*) sebagai rintisan implementasi kegiatan pada lokasi tertentu selama dua tahun, untuk

kemudian direplikasi di lokasi lain. Dari empat subsektor pengembangan kawasan pertanian, subsektor tanaman pangan menarik untuk diteliti karena merupakan komoditas utama yang menjadi sumber pangan di Indonesia. Salah satu proyek percontohan kawasan tanaman pangan yaitu untuk komoditas jagung seluas 1.000 ha di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Penilaian kinerja suatu proyek percontohan perlu dilakukan dalam upaya untuk mengetahui tingkat keberhasilannya sehingga kinerjanya dapat terukur, dan menarik pelajaran tentang permasalahan yang dihadapi sebagai bahan perbaikan bagi pelaksanaan selanjutnya atau untuk proses replikasi di daerah lain. Salah satu bentuk penilaian yang dapat dilakukan adalah evaluasi secara berkala yang bisa menjadi peringatan apabila program dan kegiatan berjalan di luar rencana serta menjadi masukan untuk perbaikan selanjutnya. Setelah dilakukan penilaian perlu juga ditetapkan prioritas strategi pengembangan agar program/kegiatan dapat berlanjut dengan capaian yang lebih baik. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah menganalisis capaian atas target dan indikator keberhasilan pada pelaksanaan pengembangan kawasan jagung berbasis korporasi petani serta merumuskan prioritas strategi pengembangan kawasan jagung berbasis korporasi petani.

METODOLOGI

Kerangka Pemikiran

Dalam konsep kawasan, teori yang umum digunakan adalah *growth pole theory* yang pertama kali dikemukakan oleh Francois Perroux pada tahun 1955. Teori pertumbuhan menyatakan bahwa saat kegiatan produksi di kutub pertumbuhan berkembang dan meningkat, akan berdampak terhadap peningkatan sektor lain dan daerah sekitar. Konsep pengembangan kawasan pertanian dituangkan dalam Permentan Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 jo Permentan Nomor 56/Permentan/RC.040/11/2016. Dalam perkembangannya, pengembangan kawasan pertanian dilaksanakan dengan pendekatan berbasis korporasi petani dan diatur dalam Permentan Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018. Selanjutnya, Menteri Pertanian menetapkan lokasi kawasan pertanian nasional dalam Permentan Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018.

Terkait dengan korporasi petani, konsep kelembagaan yang sesuai adalah yang dikemukakan oleh Williamson (2000) dalam

perspektif teori kelembagaan ekonomi baru, yang membagi empat level analisis sosial, yaitu level satu keterkandungan (kelembagaan informal, kebiasaan, tradisi, norma yang biasanya bersifat spontan); level dua lingkungan kelembagaan (aturan main formal seperti politik, birokrasi, hukum); level tiga tata kelola (aturan main, khususnya kontrak yang berhubungan dengan transaksi); dan level empat alokasi sumber daya dan kesempatan kerja (berkaitan dengan harga, kuantitas, insentif). Syahyuti (2003) mengemukakan bahwa di Indonesia, kata kelembagaan digunakan untuk padanan kata *institution* maupun *organization*, walaupun terdapat perbedaan dalam pengertian diantara keduanya. Dalam penelitian ini, kelembagaan petani yang dibahas merujuk pada organisasi, seperti pengertian yang dicantumkan dalam Permentan Nomor 82 Tahun 2013 bahwa kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.

Lingkup Bahasan

Penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan suatu proyek percontohan pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani dengan komoditas jagung. Topik kajian difokuskan pada analisis kinerja atas target dan indikator keberhasilan serta identifikasi prioritas strategi pengembangan kawasan tersebut.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di lokasi pelaksanaan kegiatan proyek percontohan pengembangan kawasan jagung berbasis korporasi petani, di Kecamatan Gunungkencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kegiatan penelitian di lapangan berupa wawancara dengan petani dan diskusi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Kegiatan dilakukan mulai bulan Desember 2019 hingga Mei 2020.

Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara dan pengisian kuesioner, serta data sekunder yang diperoleh dari petani jagung dan pejabat instansi terkait. Dari 711 petani pelaksana yang tergabung dalam lima kelompok, yang terdiri dari satu kelompok tani (poktan) dan empat kelompok Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), diambil petani

contoh sebanyak 78 orang dari satu poktan dan tiga LMDH, yaitu poktan Mekar Jaya, LMDH Giri Mukti, LMDH Mekar Sari dan LMDH Wana Tani Gerlap. Satu lagi LMDH peserta kegiatan ini, yaitu LMDH Mukti Jaya tidak diambil sebagai responden karena lokasinya yang terpisah. Selain itu, sampel yang dipilih dinilai sudah mewakili kondisi pelaksana kegiatan secara keseluruhan. Pemilihan sampel kelompok dilakukan secara *purposive*, sedangkan pemilihan sampel petani dilakukan dengan stratifikasi berdasarkan luasan, kemudian dilakukan *random sampling* terhadap petani dari masing-masing stratifikasi tersebut.

Selain petani pelaksana kegiatan, responden dalam penelitian ini adalah para pejabat dari instansi pelaksana termasuk pihak swasta yang dirancang untuk berpartisipasi aktif dalam pilot pengembangan ini. Pejabat yang dikunjungi untuk berdiskusi berasal dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Biro Perencanaan Kementan, Dinas Pertanian Provinsi Banten, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Banten, serta pengelola korporasi petani.

Analisis Data

Proyek percontohan pengembangan kawasan jagung berbasis korporasi petani seluas 1.000 ha, dilaksanakan oleh 711 orang. Untuk mengetahui capaian pelaksanaan kegiatan digunakan model evaluasi *context, input, process, product* (CIPP) yang dikemukakan Stufflebeam (1983). Model evaluasi CIPP dinilai cocok untuk penelitian ini karena sesuai dengan kerangka dalam pelaksanaan pengembangan kawasan dan dapat menilai pelaksanaan program/kegiatan secara utuh, mulai dari perencanaan sampai hasil yang dicapai.

Perumusan prioritas strategi menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) (Saaty 1990). Langkah yang dilakukan dalam metode ini adalah menyusun hirarki atas unsur-unsur berupa kriteria dan alternatif yang akan dipilih; menilai kriteria dan alternatif tersebut melalui perbandingan berpasangan; menentukan prioritas dengan melihat peringkat relatif dari seluruh alternatif; menilai konsistensi logis. Responden yang dipilih untuk analisis AHP sebanyak enam orang dari Biro Perencanaan Kementan, Ditjen PSP, BPTP Banten, Dinas Pertanian Provinsi Banten, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak, serta korporasi petani. Data diolah menggunakan *software* Expert Choice, penilaian oleh responden

dianggap konsisten apabila nilai *inconsistency* kurang dari 0,1.

Penarikan simpulan untuk tujuan pertama berdasarkan pada capaian atas target tahun pertama dan tahun kedua di lokasi proyek percontohan, serta capaian terhadap indikator keberhasilan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berbasis Korporasi Petani. Penarikan simpulan untuk tujuan kedua berdasarkan nilai tertinggi hasil pengolahan data di level faktor dan strategi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kegiatan

Dalam konsep pengembangan KPBKP, seluruh pemangku kepentingan saling terkait dalam pelaksanaan kegiatan dengan melakukan efisiensi melalui perluasan skala usaha. Petani sebagai pelaksana mendapat manfaat berupa jaminan pasar, bantuan modal kerja dan sarana produksi, jaminan ketersediaan input, mendapatkan subsidi penuh atas premi asuransi dan bunga pinjaman. Kelembagaan ekonomi petani dapat berupa koperasi, korporasi, perusahaan, atau perseroan terbatas. Kelembagaan ini bertugas untuk melakukan konsolidasi usaha tani; menjadi penghubung antara petani, Kementerian/Lembaga (K/L), dan mitra terkait; memiliki penyertaan modal sebesar 51%; membentuk unit-unit usaha; dan bertanggung jawab atas penjualan, penyertaan alat mesin pertanian (alsintan), dan tenaga kerja. Kementan memberikan bantuan berupa sarana produksi (saprodi) dan alsintan, peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) petani melalui pelatihan, melakukan pengawalan dan pendampingan penyuluh. Sedangkan K/L terkait, memberikan pendampingan administrasi dan manajemen maupun bantuan teknis dan nonteknis lainnya.

Proyek percontohan pengembangan kawasan jagung berbasis korporasi petani dilaksanakan di Kabupaten Lebak, Banten. Kabupaten Lebak dipilih karena potensi sumber daya alam, produksi, produktivitas dan mutu jagungnya masih berpotensi untuk ditingkatkan, serta terdapat 16 perusahaan produsen pakan di area sekitarnya. Target tahun pertama adalah kerja sama dengan industri pakan sedangkan target tahun kedua adalah membentuk pengolahan pakan ternak sendiri. Pemangku kepentingan terkait diantaranya Perum Perhutani sebagai pemilik lahan tempat petani menanam

jagung, Ditjen Tanaman Pangan sebagai penyedia bantuan saprodi, Ditjen PSP sebagai penyedia alsintan prapanen dan irigasi, BPTP Banten sebagai pelaksana *demonstration farm* (demfarm) budidaya jagung dan pelatihan untuk petani, Pemerintah Provinsi Banten sebagai penyedia herbisida, dan Pemerintah Kabupaten Lebak sebagai penyedia pompa sumur dalam.

Kondisi Umum Lokasi Kegiatan

Kabupaten Lebak berada pada ketinggian antara 201-501 m di atas permukaan laut (dpl) dan Kecamatan Gunungkencana berada di kisaran 210–240 m dpl. Ketinggian di Kecamatan Gunungkencana tersebut sesuai untuk penanaman jagung yang dapat tumbuh secara optimal pada ketinggian 50–600 m dpl. Kabupaten Lebak memiliki lahan seluas 304.472 ha, diantaranya seluas 246.243 ha (80,88%) merupakan lahan pertanian yang terbagi menjadi 49.677 ha sawah dan 196.566 ha non sawah.

Secara umum, musim kemarau di Kabupaten Lebak berlangsung mulai pada minggu ketiga bulan Mei hingga minggu kedua bulan Oktober dengan curah hujan antara 264–623 mm. Sedangkan, musim hujan berlangsung pada minggu kedua bulan Oktober hingga minggu ketiga bulan Mei dengan curah hujan antara 1.116–3.345 mm (BPS 2016). Data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Lebak berada pada kategori yang sesuai berdasarkan kriteria kesesuaian lahan untuk komoditas jagung.

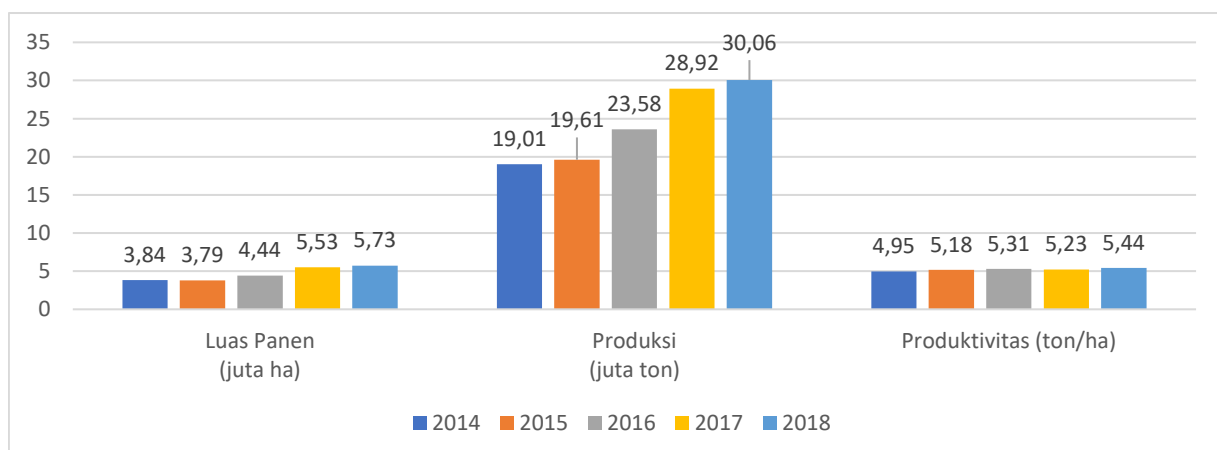
Data luas panen, produksi, dan produktivitas jagung nasional tahun 2014–2018 secara umum menunjukkan adanya peningkatan (Kementan, 2019). Pada tahun 2018 produksi jagung

nasional mencapai 30,06 juta ton pipilan kering dengan luas panen 5,37 juta ha dan produktivitas 5,44 ton/ha. Pada tahun 2015, luas panen jagung mengalami penurunan sebesar 1,29% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, tingkat produktivitas jagung pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 1,51% dibandingkan tahun sebelumnya (Gambar 1).

Apabila dibandingkan dengan produksi jagung sebelum pelaksanaan kegiatan, di Kecamatan Gunungkencana terjadi peningkatan produksi lebih dari tiga kali lipat, di Kabupaten Lebak terjadi peningkatan produksi lebih dari empat kali lipat, dan di Provinsi Banten terjadi peningkatan produksi hampir tiga kali lipat. Kecamatan Gunungkencana memberikan rata-rata kontribusi produksi sebesar 8,51% terhadap total produksi dari 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak memberikan rata-rata kontribusi produksi sebesar 22,53% terhadap total produksi dari delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten. Provinsi Banten memberikan rata-rata kontribusi produksi sebesar 0,29% terhadap total produksi nasional, secara rinci terlihat pada Tabel 1.

Capaian Pengembangan Kawasan Jagung Berbasis Korporasi Petani

Model evaluasi CIPP dipilih sebagai alat analisis karena dinilai dapat menggambarkan hasil suatu kegiatan secara menyeluruh, mulai dari proses perencanaan hingga hasil yang diperoleh. Evaluasi *context* berhubungan dengan *goals* atau tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi *input* berhubungan dengan *plans* atau rencana yang akan dijalankan. Evaluasi *process* berhubungan dengan *actions* atau tindakan yang



Sumber: Kementan (2019)

Gambar 1. Perkembangan luas panen, produksi dan produktivitas jagung Indonesia, 2014–2018

Tabel 1. Produksi jagung tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional, 2016–2018 (Ton)

Tahun	Kecamatan Gunungkencana	Kabupaten Lebak	Provinsi Banten	Nasional
2016	230	3.234	19.882	23.578.413
2017	1.297	12.227	63.517	28.924.015
2018	4.373	55.931	174.334	30.055.623

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak dan Kementan (2019)

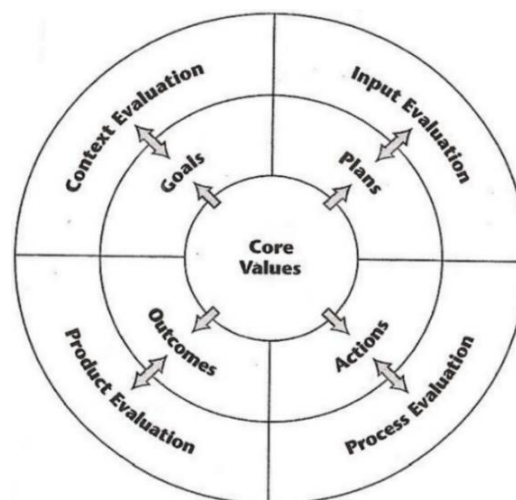
dilakukan. Evaluasi *product* berhubungan dengan *outcomes* atau capaian yang diraih. Stufflebeam (2015) menggambarkan nilai inti model evaluasi CIPP seperti terlihat pada Gambar 2.

Gambaran umum karakteristik responden petani pelaksana kegiatan yang diidentifikasi meliputi informasi mengenai gender, pendidikan, dan usia. Berdasarkan sebaran gender reponden pelaksana kegiatan, pada Tabel 2 menunjukkan jumlah petani dengan gender laki-laki hampir tiga kali lipat dari petani dengan gender perempuan. Menurut Siwi dalam Notoatmojo (2011), peran gender sangat dominan dalam pembangunan usahatani dan peningkatan pendapatan petani. Notoatmojo (2011) menambahkan bahwa wanita tani berperan dalam melaksanakan dan memutuskan kebijakan dan tugas usahatani, sedangkan bapak tani lebih berfungsi dalam pengadaan faktor produksi dan penentuan komoditi yang diusahakan.

Sebaran tingkat pendidikan reponden pelaksana kegiatan yang disajikan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa 53,85% petani hanya menempuh pendidikan dasar, 41,02% menempuh pendidikan menengah, dan hanya 5,13% yang menempuh pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan petani dalam melakukan usahatani. Dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, petani akan lebih mudah untuk menerima materi yang diberikan dalam pembinaan, pelatihan maupun

dalam adopsi teknologi. Sebagai contoh, tingkat pendidikan memberikan pengaruh positif terhadap produksi tanaman sembung (Susanti *et al.* 2016), pendapatan petani karet (Juliansyah dan Riyono 2018), pendapatan petani dan alih fungsi lahan pertanian di Bali (Aryawati dan Budhi 2018), dan kompetensi nelayan ikan demersal (Mardin 2009).

Apabila dilihat secara terpisah, lebih dari separuh responden yang hanya berpendidikan SD berisiko kesulitan untuk menerima materi yang diberikan dalam pembinaan, pelatihan, maupun adopsi teknologi. Namun, dalam pengembangan KPBKP, petani tidak bekerja



Gambar 2. Nilai inti model evaluasi CIPP

Tabel 2. Sebaran gender responden pelaksana kegiatan proyek percontohan PKBKP jagung di Kecamatan Gunungkencana, Kabupaten Lebak, 2018

Gender	Kelompok				Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
	Giri Mukti (orang)	Mekar Jaya (orang)	Mekar Sari (orang)	Wana Tani Gerlap (orang)		
Laki-laki	39	8	4	9	60	76,92
Perempuan	13	4	1	0	18	23,08
Jumlah	52	12	5	9	78	100,00

Sumber: hasil wawancara, diolah

Tabel 3. Sebaran tingkat pendidikan responden pelaksana kegiatan proyek percontohan PKBKP jagung di Kecamatan Gunungkencana, Kabupaten Lebak, 2018

Tingkat pendidikan	Kelompok				Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
	Giri Mukti (orang)	Mekar Jaya (orang)	Mekar Sari (orang)	Wana Tani Gerlap (orang)		
SD	30	7	2	3	42	53,85
SMP	8	1	1	2	12	15,38
SMA	13	3	2	2	20	25,64
D3/S1	1	1	0	2	4	5,13
Jumlah	52	12	5	9	78	100,00

Sumber: hasil wawancara, diolah

sendiri-sendiri melainkan dalam satu kelompok besar. Dengan demikian, 30,77% responden yang berpendidikan minimal SMA dapat menjadi penghela dan membantu memberikan pemahaman kepada anggota lainnya sehingga dapat meminimalisir risiko tersebut.

Sebaran usia reponden pelaksana kegiatan seperti ditampilkan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa 88,46% responden berusia di bawah 50 tahun atau berada pada usia yang produktif. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi dan pelaksana kegiatan siap dan bisa menjadi modal yang kuat bagi keberlanjutan pelaksanaan kegiatan. Usia berperan dalam membentuk pola pikir petani menjalankan usahatani, kinerja, maupun produktivitasnya, karena kemampuan fisik seseorang setelah melewati tingat usia tertentu cenderung akan menurun dengan bertambahnya usia. Awaliah (2012) menyatakan petani yang berusia lebih tua cenderung kurang setuju dengan informasi baru yang disampaikan, karena memiliki pengalaman yang lebih banyak dan lebih percaya pada pengalaman mereka dalam melakukan usahatani padi. Krisnawati (2014) menambahkan bahwa pada usia non

produktif, petani cenderung sulit menerima inovasi.

Evaluasi Context

Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berbasis Korporasi Petani menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk 1) meningkatnya produksi, produktivitas, nilai tambah, dan daya saing komoditas tanaman pangan prioritas nasional; 2) tersedianya dukungan prasarana dan sarana pertanian di lokasi kawasan secara optimal; 3) teraplikasinya teknologi inovatif spesifik lokasi di lokasi kawasan; 4) meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kewirausahaan petani dalam mengelola kelembagaan ekonomi petani; serta 5) berfungsinya sistem usaha tani secara utuh, efektif, dan efisien.

Doran (1981) menyebutkan bahwa setiap menentukan tujuan, idealnya memenuhi kriteria SMART, yaitu *specific, measurable, assignable realistic, and time-related*. Berdasarkan kriteria tersebut, penetapan tujuan sudah cukup baik dengan rincian penjelasan sebagai berikut. Pertama, tujuan fokus pada lokasi

Tabel 4. Sebaran usia responden pelaksana kegiatan proyek percontohan PKBKP jagung di Kecamatan Gunungkencana, Kabupaten Lebak, 2018

Usia (tahun)	Kelompok				Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
	Giri Mukti (orang)	Mekar Jaya (orang)	Mekar Sari (orang)	Wana Tani Gerlap (orang)		
20-30	13	3	2	2	20	25,64
31-40	19	4	1	5	29	37,18
41-50	14	3	2	1	20	25,64
51-60	5	2	0	1	8	10,26
>60	1	0	0	0	1	1,28
Jumlah	52	12	5	9	78	100,00

Sumber: hasil wawancara, diolah

pengembangan kawasan yang telah ditetapkan dengan mengacu pada RTRW provinsi dan kabupaten/kota, peta kesesuaian lahan, atlas potensi pengembangan kawasan serta peraturan-perundang-undangan yang terkait. Kedua, *measurable*, tujuan tidak menyebutkan kuantitas yang ingin dicapai, namun indikator keberhasilan ditetapkan dalam petunjuk teknis kegiatan dan dijelaskan dalam bentuk matriks tahunan di dokumen *action plan*. Ketiga, *assignable*, personil yang bertanggungjawab ditetapkan dalam petunjuk teknis kegiatan, diantaranya pembinaan oleh Ditjen/Badan lingkup Kementan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan oleh Tim Teknis. Keempat *realistic*, hasil evaluasi menunjukkan penetapan tujuan dinilai belum realistis, mengingat seluruh aspek diharapkan tercapai tanpa ada penjadwalan terkait waktu pencapaian untuk masing-masing tujuan, sedangkan terdapat keterbatasan baik anggaran, waktu, skala prioritas dengan kegiatan lain dan jumlah personil pelaksana kegiatan. Kelima, *time-related*, tujuan tidak menyebutkan kapan atau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk dicapai, namun dalam petunjuk teknis disebutkan adanya penetapan sasaran selama lima tahun, dan pelaksanaan kegiatan percontohan selama dua tahun.

Evaluasi Input

Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berbasis Korporasi Petani menyebutkan bahwa aspek penguatan perencanaan pengembangan kawasan tanaman pangan dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu 1) penentuan kriteria kawasan; 2) penyusunan *masterplan*; 3) penyusunan *action plan*; 4) sinkronisasi rencana pengembangan kawasan lingkup provinsi; dan 5) sinkronisasi rencana pengembangan kawasan lingkup Eselon I Kementan. Penentuan kriteria kawasan yang mengacu pada ceklis penilaian kesesuaian berdasarkan Permentan Nomor 41 Tahun 2009, menunjukkan bahwa terdapat syarat petani yang belum dipenuhi, yaitu tidak tergabung dalam (poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan), atau perkumpulan petani pemakai air (P3A), melainkan tergabung dalam LMDH. Selain itu, tidak semua petani menjadi anggota koperasi yang sudah ditunjuk menjadi kelembagaan ekonomi petani.

Hasil penilaian klasifikasi kawasan pertanian di Kabupaten Lebak menunjukkan kawasan jagung berada pada tahap belum berkembang karena fokus kegiatan hanya pada *on-farm* untuk peningkatan produksi. Belum ada pengembangan khusus untuk teknologi budidaya

jagung, sarana prasarana pertanian yang diberikan masih bersifat umum bukan khusus pertanian jagung, serta masih diperlukan penguatan melalui bimbingan dan penyuluhan pertanian. Dari segi tipe kawasannya, kawasan jagung di Kabupaten Lebak termasuk tipe kawasan pertumbuhan karena rata-rata produksinya masih di bawah rata-rata produksi Provinsi Banten. Pemanfaatan lahan belum optimal, dan tingkat kehilangan hasil jagung tergolong tinggi. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, kegiatan pengembangan kawasan jagung di Kabupaten Lebak tepat untuk dilakukan, karena adanya potensi untuk peningkatan produksi dan pengembangan budidaya.

Evaluasi Process

Pemerintah mengupayakan agar sarana prasarana untuk pelaksanaan kegiatan dapat terpenuhi, diantaranya dengan memberikan bantuan seperti yang tercantum dalam dokumen *action plan*/rencana aksi, yaitu untuk memenuhi ketersediaan air; alsintan pratanam; penanganan pasca panen, serta jalan usahatani. Selain itu, direncanakan pula sarana penunjang berupa kerja sama usaha dengan BUMN, swasta, kredit dari perbankan, serta penyuluhan untuk petani. Hasil observasi dan wawancara di lapangan menunjukkan bahwa:

1. Bantuan dikelola oleh masing-masing kelompok, sehingga belum mencerminkan korporasi sebagai organisasi utama yang mengatur keseluruhan usaha. Namun demikian, 87,2% responden menyatakan bahwa program ini memberikan tambahan sarana prasarana yang dapat diakses dan 70,5% responden menyatakan mendapat akses untuk memanfaatkan sarana prasarana tersebut;
2. Kerja sama dengan pihak lain hanya dilakukan dengan PT. Perhutani selaku pemilik lahan, sedangkan dengan perusahaan pakan yang sebelumnya sudah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) atau perjanjian kerja sama, tidak berjalan;
3. Kapasitas sarana pengairan belum memenuhi kebutuhan seluruh petani, terlihat dari 29,5% responden menyatakan belum mendapat akses terhadap sarana pengairan yang dibangun;
4. Akses terhadap permodalan dari industri jasa keuangan bank maupun non bank belum didapat oleh 47,4% responden. Modal usahatannya hanya diperoleh dari bantuan saprodi dan alsintan dari Kementan serta swadaya petani;

- Pelatihan kepada petani hanya mampu menjangkau sekitar 6% dari jumlah seluruh petani pelaksana, sebanyak 50,1% responden menyatakan pelatihan yang didapat belum memadai.

Evaluasi Product

Target dan realisasi luas tanam, panen, produksi dan produktivitas jagung di Kabupaten Lebak untuk tahun 2017 – 2019 dapat dilihat pada Tabel 5. Luas panen, produksi, dan produktivitas mengalami peningkatan secara signifikan pada tahun 2018 karena adanya bantuan dalam program UPSUS dan pengembangan kawasan pertanian. Namun apabila dibandingkan dengan produktivitas jagung nasional, capaiannya masih di bawah 60%. Produktivitas tahun 2017 sebesar 2,98 ton/ha atau hanya 56,98% dari produktivitas jagung nasional yang sebesar 5,23 ton/ha. Produktivitas tahun 2018 sebesar 3,12 to/ha atau

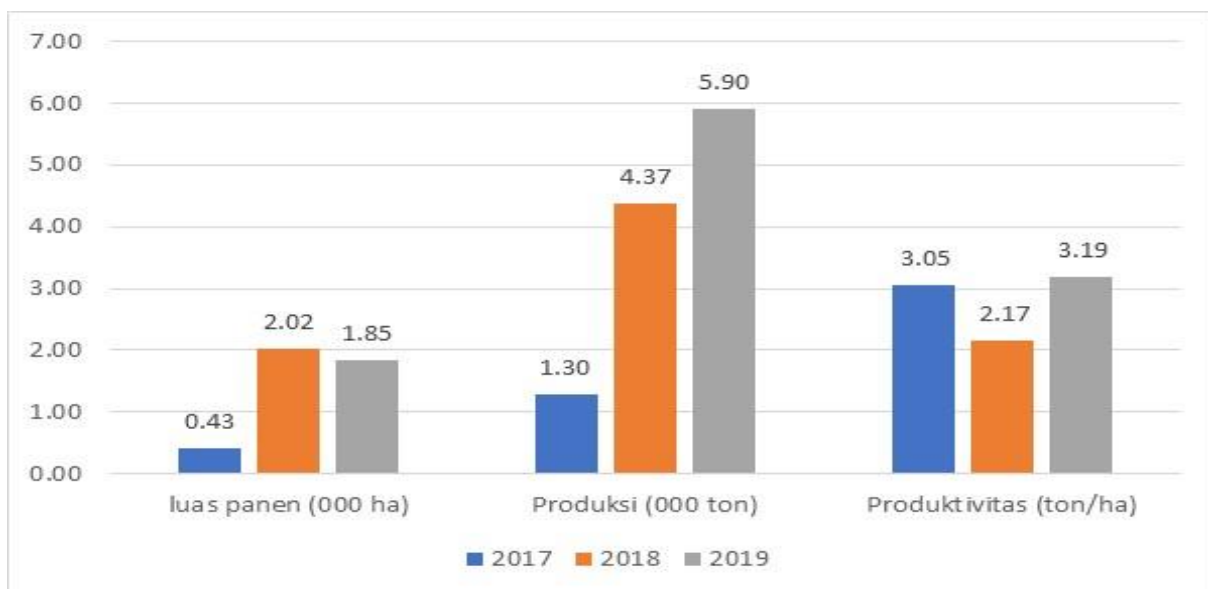
hanya 59,54% dari produktivitas jagung nasional sebesar 5,24 ton/ha. Sedangkan untuk tahun 2019, data produktivitas nasional belum tersedia.

Di kecamatan Gunungkencana sebagai pelaksana proyek percontohan, terjadi peningkatan luas panen, produksi, dan produktivitas (Gambar 3). Luas panen naik secara signifikan pada tahun 2018, dari 425 ha menjadi 2.017 ha. Hal ini dikarenakan adanya alokasi bantuan pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani seluas 1.000 ha. Pada tahun 2019, luas panen mengalami sedikit penurunan menjadi 1.848 ha, namun masih lebih tinggi dari sebelum adanya kegiatan karena petani melanjutkan penanaman jagung di lokasi bantuan. Produksi juga mengalami peningkatan secara signifikan dari 1.297 ton pada tahun 2017 menjadi 4.373 ton pada tahun 2018. Produksi tertinggi dicapai pada tahun 2019 sebesar 5.904 ton. Hal ini dikarenakan penanaman jagung banyak dilakukan pada akhir

Tabel 5. Target dan realisasi luas panen, produksi dan produktivitas jagung di Kabupaten Lebak, 2017–2019

Tahun	Luas panen (ha)		Produksi (ton)		Produktivitas (ton/ha)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2017	1.065,3	4.538,2	3.321,4	12.227,4	3,12	2,98
2018	1.067,4	17.952,0	3.387,8	55.930,7	3,17	3,12
2019	1.069,5	5.166,5	3.455,6	15.749,4	3,24	3,05

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak (2020)



Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak (2020)

Gambar 3. Perkembangan luas panen, produksi dan produktivitas jagung di Kec. Gunungkencana, 2017–2019

tahun 2018 sehingga produksinya menjadi *carry over* di tahun 2019. Hasil observasi dan wawancara di lapangan menunjukkan bahwa:

1. Sebanyak 89,7% responden menyatakan tidak mengalami kesulitan dalam menjual hasil produksinya. Diantaranya sebanyak 85,9% menyatakan mendapat tambahan pendapatan setelah pelaksanaan proyek percontohan pengembangan kawasan jagung berbasis korporasi petani;
2. Responden yang bersedia tetap melakukan budidaya jagung walaupun tidak ada lagi bantuan pemerintah hanya sebanyak 77,0%, sedangkan sisanya sebanyak 23,0% menyatakan tidak bersedia melanjutkan budidaya jagung. Kelompok petani ini khawatir terhadap adanya potensi kerugian yang besar jika seluruh modal untuk pelaksanaan usahatani dipenuhi sendiri secara swadaya dan kemudian terjadi musibah seperti serangan OPT atau kekeringan pada lokasi usahatannya.

Kelayakan Usahatani Jagung

Keberhasilan pengelolaan usahatani ditentukan oleh besarnya biaya yang dikeluarkan dan tingkat penerimaan. Biaya usahatani ditentukan oleh tingkat penggunaan dan harga jenis input yang digunakan. Adapun penerimaan ditentukan oleh tingkat produktivitas yang dicapai dan harga jual produk yang diterima petani (Saptana 2018). Analisis usahatani pada petani pelaksana kegiatan dibedakan berdasarkan luas lahan, yaitu petani yang pengusahaan lahannya kurang dari 2 ha dan lebih dari 2 ha, dilakukan terhadap rata-rata *output* dan penggunaan *input*

dengan rekomendasinya (Tabel 6), serta analisis finansial usahatani (Tabel 7).

Produksi pada petani dengan luas lahan ≥ 2 ha lebih tinggi 4,64% dibandingkan dengan produksi pada petani dengan luas lahan < 2 ha, diduga disebabkan oleh rata-rata penggunaan input yang lebih besar. Capaian keduanya lebih tinggi dibandingkan sasaran produksi di Kecamatan Gunungkencana, masing-masing sebesar 31,28% dan 25,46%. Petani mendapatkan bantuan benih jagung sebanyak 15 kg/ha, penggunaan benih melebihi rekomendasi dilakukan untuk penyulaman pada pertanaman.

Penggunaan pupuk Urea pada petani dengan dengan luas lahan ≥ 2 ha lebih tinggi 30% dibandingkan rekomendasi, sedangkan pada petani dengan luas lahan < 2 ha lebih rendah 10% dibandingkan rekomendasi. Seluruh petani mendapatkan bantuan pupuk Urea sebanyak 50 kg/ha. Petani dengan luas lahan ≥ 2 ha bersedia untuk menambahkan lebih banyak pupuk Urea dengan harapan produksi yang dicapai lebih tinggi sehingga pendapatan yang diperoleh semakin besar. Penggunaan pupuk SP-36 pada petani dengan luas lahan ≥ 2 ha lebih rendah dari rekomendasi, sedangkan pada petani dengan luas lahan < 2 ha lebih tinggi dari rekomendasi, namun demikian perbedaannya tidak terlalu signifikan atau masih berada pada kisaran rekomendasi.

Penggunaan input NPK, pupuk organik dan tenaga kerja pada kedua kelompok luasan masih di bawah rekomendasi. Hal tersebut disebabkan penggunaan input tersebut seluruhnya dipenuhi dari swadaya petani sehingga belum mampu untuk memenuhi kebutuhan sesuai rekomendasi.

Tabel 6. Perbandingan struktur input-outpt usahatani jagung/ha berdasarkan luas garapan dan rekomendasi di proyek percontohan PKBKP di Kecamatan Gunungkencana, Kabupaten Lebak, 2018–2019

Komponen	Petani dengan luas lahan < 2 ha (kg/ha)	Petani dengan luas lahan ≥ 2 ha (kg/ha)	Rekomendasi (kg/ha)
1 Produksi (pipilan kering)	4.420	4.625	3.523***
2 Benih	17	17	15*
3 Urea	181	260	200*
4 SP-36	111	93	100**
5 NPK	164	195	300*
6 Pupuk organik	1.750	2.800	5.000*
7 Tenaga Kerja (HOK)	43	50	87**

Sumber: hasil wawancara, diolah

Keterangan : * = BPTP Provinsi Banten, 2019

** = Budidaya Tanaman Jagung, BPTP Provinsi Aceh, 2009

*** = Sasaran tanam, produksi dan produktivitas jagung Kecamatan Gunungkencana, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak 2018

Tabel 7. Analisis finansial usahatani jagung pada proyek percontohan PKBKP di Kecamatan Gunungkencana, Kabupaten Lebak, 2018–2019

Komponen	Petani dengan luas lahan < 2 ha (Rp/ha)	Petani dengan luas lahan ≥ 2 ha (Rp/ha)
A. Biaya	6.709.710	8.480.205
Benih	1.406.897	1.362.931
Urea	471.552	581.897
SP-36	322.813	260.227
NPK	550.000	673.149
Organik	875.000	1.400.000
Pestisida	204.211	348.333
Tenaga Kerja	2.139.655	2.514.900
Alsintan/Pengolahan	531.250	1.158.333
Pengangkutan	208.333	180.435
B. Penerimaan	15.120.345	15.741.724
C. Keuntungan (B-A)	8.410.635	7.261.520
D. R/C rasio (B/A)	2,25	1,86
E. B/C rasio (C/A)	1,25	0,86

Sumber: hasil wawancara, diolah

Namun demikian, pada petani dengan luasan ≥ 2 ha, penggunaan inputnya lebih banyak dibandingkan petani dengan luas lahan < 2 ha, dengan harapan produksi yang dicapai lebih tinggi sehingga pendapatan yang diperoleh semakin besar.

Berdasarkan Tabel 7, dapat dilihat bahwa biaya per hektar yang dikeluarkan oleh petani dengan luas lahan ≥ 2 ha lebih tinggi 26,39% dibandingkan petani dengan luas lahan < 2 ha. Perbedaan yang cukup signifikan adalah pada penggunaan pupuk organik dan biaya untuk alsintan/pengolahan. Hal ini diduga karena petani dengan luas lahan ≥ 2 ha bersedia mengeluarkan biaya lebih banyak untuk pembelian pupuk organik dengan harapan produksi lebih tinggi sehingga hasil dan keuntungan yang akan diperoleh juga lebih besar. Sedangkan untuk komponen alsintan dan pengangkutan, diduga karena petani dengan luas lahan ≥ 2 ha menggunakan *vertical dryer* untuk pengeringan hasil panen, maka pengeluarannya lebih besar dibandingkan petani dengan luas lahan < 2 ha yang hanya menggunakan lantai jemur.

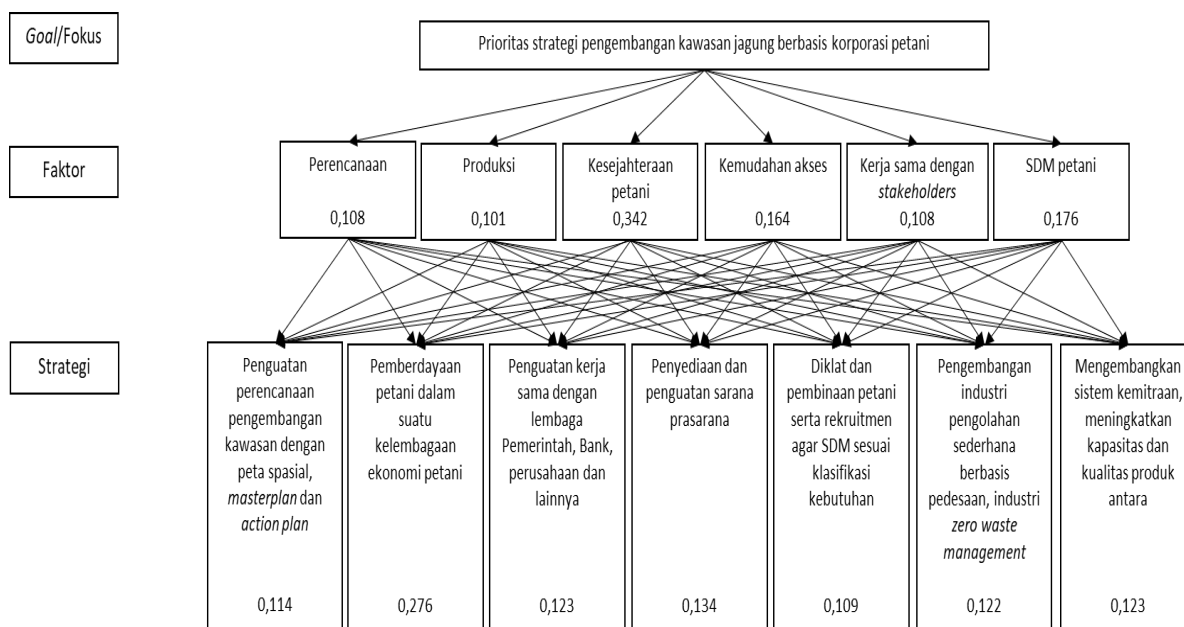
Return Cost Ratio (R/C rasio) dan *Benefit Cost Ratio* (B/C rasio) biasanya digunakan untuk menggambarkan tingkat efisiensi suatu usahatani. Semakin besar nilai R/C dan B/C, maka semakin baik kedudukan ekonomi usahatani. Walaupun penerimaan pada petani luas lahan ≥ 2 ha lebih tinggi dibandingkan petani dengan luas lahan < 2 ha, tetapi keuntungan yang didapat lebih rendah karena biaya input

yang dikeluarkan lebih besar. Keduanya masih layak untuk diusahakan, sesuai dengan penelitian Suryana dan Agustian (2014) bahwa usahatani jagung di beberapa daerah di Indonesia memiliki kelayakan usaha Rp6,7 juta/ha dengan R/C rasio 1,73. Namun demikian, penanaman pada luas lahan < 2 ha lebih menguntungkan dibandingkan dengan luas lahan ≥ 2 ha, terlihat dari nilai B/C rasionya yang lebih tinggi.

Prioritas Strategi Pengembangan Kawasan Jagung Berbasis Korporasi Petani

Hierarki dibuat dengan menetapkan *goal/fokus*, lalu menentukan faktor atau kriteria yang dinilai, serta strategi yang akan dilakukan. Penetapan faktor dan strategi seluruhnya mengacu pada Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berbasis Korporasi Petani. Dengan menggunakan metode AHP, dapat dipilih strategi yang sebaiknya didahulukan, mengingat dalam pelaksanaan kegiatan ada faktor pembatas, antara lain anggaran, waktu, dan SDM. Hasil penilaian pada hierarki yang telah disusun secara rinci terlihat pada Gambar 4.

Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa faktor yang dinilai paling penting adalah kesejahteraan petani dengan nilai 0,342 dan nilai inkonsistensi 0,04. Sedangkan strategi yang lebih penting untuk dilakukan terlebih dahulu adalah pemberdayaan petani dalam suatu kelembagaan petani dengan nilai 0,276 dan nilai



Gambar 4. Penilaian pada hierarki dengan tujuan prioritas strategi pada kegiatan PKBKP jagung di Kabupaten Lebak, 2019



- Ket :
- RENC = Perencanaan
 - PROD = Produksi
 - SJTH = Kesejahteraan petani
 - AKSS = Kemudahan akses
 - KRJS = Kerja sama dengan *stakeholders*
 - SDMP = SDM petani
 - PRNC = Penguatan perencanaan pengembangan kawasan
 - BRDY = Pemberdayaan petani dalam suatu kelembagaan ekonomi petani
 - KSLP = Penguatan kerja sama dengan Lembaga (Pemerintah maupun swasta)
 - PPSP = Penyediaan dan penguatan sarana prasarana
 - DKLT = Diklat dan pembinaan petani serta rekrutmen agar SDM sesuai klasifikasi kebutuhan
 - IPSD = Pengembangan industri pengolahan sederhana berbasis pedesaan, industri *zero waste management*
 - KMTR = Mengembangkan sistem kemitraan, meningkatkan kapasitas dan kualitas produk antara

Gambar 5. Penilaian faktor yang paling berpengaruh pada setiap strategi pada PKBKP jagung di Kabupaten Lebak, 2019

inkonsistensi 0,04. Kesejahteraan petani penting untuk dicapai karena petani berperan dalam menjaga ketersediaan pangan. Apabila kesejahteraannya terjaga, maka petani tidak akan berpaling pada mata pencaharian lain yang secara tidak langsung mengancam ketersediaan pangan Indonesia. Pemberdayaan petani dalam suatu kelembagaan petani dapat membuat posisi petani lebih kuat, sehingga kesejahteraannya dapat lebih mudah dicapai. Hal ini sejalan dengan penelitian Wulandari dan Prajanti (2018) bahwa kriteria kelembagaan menjadi prioritas utama dalam meningkatkan minat kaum muda sebagai upaya revitalisasi pertanian. Untuk melihat faktor yang paling berpengaruh pada masing-masing strategi, dapat dilihat pada Gambar 5.

Berdasarkan data pada Gambar 5, apabila dilakukan pembobotan urutan faktor pada seluruh strategi, maka faktor yang paling berpengaruh pada seluruh strategi tersebut secara berturut-turut adalah perencanaan, SDM petani, dan kerja sama dengan *stakeholders*. Namun demikian, karena berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa prioritas strategi adalah pemberdayaan petani dalam suatu kelembagaan petani, maka berdasarkan penilaian di atas, faktor yang perlu diperhatikan adalah faktor kesejahteraan petani dengan nilai 0,233.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Usahatani jagung pada proyek percontohan PKBKP di Kecamatan Gunungkencana menguntungkan petani, baik untuk petani skala sempit (<2 ha) maupun luas (≥2 ha).
2. Target proyek percontohan pengembangan kawasan jagung untuk tahun pertama berupa kerja sama dengan industri pakan dan tahun kedua untuk membentuk pengolahan pakan ternak sendiri belum tercapai.
3. Terdapat tiga indikator keberhasilan yang berhasil dicapai, yaitu a) peningkatan produksi lebih dari empat kali lipat di Kabupaten Lebak dan lebih dari tiga kali lipat di Kecamatan Gunungkencana; b) peningkatan pendapatan terhadap 85,9% petani pelaksana kegiatan; dan c) terapkannya teknologi inovatif spesifik lokasi.

4. Terdapat empat indikator keberhasilan yang belum tercapai, yaitu: a) tersedianya sarana prasarana secara optimal; b) peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kewirausahaan petani; c) berfungsinya sistem usaha tani secara utuh, efektif, dan efisien; d) kolaborasi petani, kelembagaan dengan *off-taker*.
5. Faktor yang dinilai paling penting dalam pelaksanaan pengembangan PKBKP jagung adalah kesejahteraan petani, sedangkan strategi yang dinilai lebih penting untuk dilakukan terlebih dahulu adalah pemberdayaan petani dalam suatu kelembagaan petani

Implikasi Kebijakan

Mengupayakan agar pengembangan kawasan jagung berbasis korporasi di lokasi proyek percontohan tetap dilanjutkan, mengingat besarnya investasi yang telah diberikan pemerintah untuk alokasi bantuan. Namun demikian, pelaksanaannya perlu diikuti dengan perbaikan-perbaikan, diantaranya sebagai berikut:

1. Memperkuat kelembagaan petani dengan memfungsikan korporasi sebagai lembaga yang menjadi perpanjangan tangan petani agar posisi petani menjadi lebih kuat dan kesejahteraannya menjadi semakin tercapai.
2. Mengupayakan pelatihan yang menjangkau lebih banyak petani agar pengetahuan, keterampilan dan kewirausahaan petani dalam mengelola kelembagaan ekonomi petani peserta PKBKP semakin meningkat.
3. Mengupayakan dengan sungguh-sungguh untuk membangun kerja sama dengan industri pemanfaat hasil produksi atau membangun sarana pengolahan berbasis pedesaan sebagai upaya menciptakan nilai tambah terhadap produk yang dihasilkan.
4. Melaksanakan strategi kegiatan PKBKP dengan memprioritaskan pada pemberdayaan petani dalam suatu kelembagaan ekonomi petani dengan fokus pada faktor peningkatan kesejahteraan petani.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu terwujudnya penelitian ini, Badan PPSDMP Kementan, Ditjen

Tanaman Pangan Kementan, Ditjen PSP Kementan, Biro Perencanaan Kementan, BPTP Banten, Dinas Pertanian Provinsi Banten, serta Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anantayu S. 2009. Partisipasi petani dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok petani (kasus di Provinsi Jawa Tengah) [disertasi]. [Bogor (ID)]: Institut Pertanian Bogor
- Arianingsih E. 2016. Peningkatan produksi ubi kayu berbasis kawasan di Provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. *Analisis Kebijakan Pertanian* [internet]. [diunduh 2019 Sep 8]; 14(2):125-148. Tersedia dari: <http://www.ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/akp/article/view/8180/6984>
- Aryawati NPR, Budhi MKS. 2018. Pengaruh produksi, luas lahan dan pendidikan terhadap pendapatan petani dan alih fungsi lahan provinsi bali. *E jurnal EP Unud* [internet]; [diunduh 2020 Mei 7]; 7(9):1918-1952. Tersedia dari www.ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/40263/25341
- Awaliah R. 2012. Efektivitas media komunikasi bagi petani padi di Kecamatan Gandung Kota Palembang (kasus Program Ketahanan pangan) [Tesis]. [Bogor (ID)]: Institut Pertanian Bogor
- [BPTP] Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh. 2012. Laporan akhir tahun pengembangan model kawasan rumah pangan lestari di Provinsi Aceh [internet]. [diunduh 2019 Sep 17]. Tersedia dari: http://nad.litbang.pertanian.go.id/ind/images/dokumen/HasilLitkaji/2012/14-Lap.%20akhir_MKRPL_Aceh_2012.pdf
- Doran GT. 1981. There's a S.M.A.R.T. Way to Write Management's Goals and Objectives. *Management Review* [internet]; [diunduh 2020 Jun 20]; 70(11):35-36. Tersedia dari: www.community.mis.temple.edu/mis0855002fall2015/files/2015/10/S.M.A.R.T-Way-Management-Review.pdf
- Hermanto, Swastika DKS. 2011. Penguatan kelompok tani : langkah awal peningkatan kesejahteraan petani. *Analisis Kebijakan Pertanian* [internet]. [diunduh 2019 Nov 26]; 9(4):371-390. Tersedia dari: <http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/akp/article/view/4203/3546>
- Juliansyah H, Riyono A. 2018. Pengaruh produksi, luas lahan dan tingkat pendidikan terhadap pendapatan petani karet di Desa Bukit Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Ekonomi Pertanian Unimal* [internet]; [diunduh 2020 Mei 7]; 01(02). Tersedia dari www.ojs.unimal.ac.id/index.php/JEPU/issue/view/135
- Krisnawati. 2014. Persepsi petani terhadap peranan penyuluh pertanian di Desa Sidomulyo dan Muari Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan Perdagangan [tesis]. [Bogor (ID)]: Institut Pertanian Bogor
- Kurniasari E, Nikmatullah D, Prayitno RT. Dampak program pengembangan kawasan sapi potong terhadap kinerja dan pendapatan anggota kelompok tani di Kabupaten Lampung Utara. 2016. Dalam: Zulfanita, Utami DP, Mudawarach RE, Wicaksono IA, Windani I, Iskandar F, editor. *Prosiding Seminar Nasional Pertanian Peternakan Terpadu 1. Pengembangan Sumber Daya Lokal untuk Mewujudkan Kemandirian Pangan* [internet]; 2016 Mar 12; Purworejo, Indonesia. Purworejo (ID): Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Purworejo. hlm. 298-314. [diunduh 2019 September 17]. Tersedia dari: <https://www.eproceedings.umpwr.ac.id/index.php/pertanian/article/view/206/188>
- Mardin. 2009. Faktor-faktor yang berpengaruh pada kemandirian nelayan ikan demersal di kecamatan wangi-wangi selatan kabupaten wakatobi Sulawesi Tenggara [tesis]. [Bogor (ID)]: Institut Pertanian Bogor
- Musthofa I dan Kurnia G. 2018. Prospek penerapan sistem *corporate farming*. *Jurnal Agrisepe Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis* [internet]. [diunduh 2019 Nov 26]; 16(1):11-22. Tersedia dari: <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/agrisepe/article/download/1525/pdf>
- Notoatmojo B. 2011. Peranan gender dalam usaha tani di kawasan Indonesia bagian timur. *Journal The Winners* [internet]. [diunduh 2020 Mei 7]; 2(2):116-129. Tersedia dari <https://media.neliti.com/media/publications/164939-ID-peranan-gender-dalam-usaha-tani-di-kawas.pdf>
- Prawiranegara D. 2016. Penguatan peran kelembagaan petani dalam peningkatan kapabilitas petani mengelola inovasi berbasis teknologi informasi [disertasi]. [Bogor (ID)]: Institut Pertanian Bogor
- Purwantini TB, Saptana, Suharyono S. 2012. Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kabupaten Pacitan : analisis dampak dan antisipasi ke depan. *Analisis Kebijakan Pertanian* [internet]. [diunduh 2019 Sep 8]; 10(3):239-256. Tersedia dari: <http://www.ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/akp/article/view/4090/3417>
- Saaty TL. 1990. How to make a decision : the analytic hierarchy process. *European Journal of Operational Research*. 48:9-26
- Saptana, T, Purwantini, dan Rachmita AR. 2018. Adopsi teknologi dan kelayakan usahatani jagung hibrida pada agroekosistem Lahan Kering. *Jurnal Penelitian Tanaman Pangan*. 2(3):181-190. doi:10.21082/jpptp tp.v2n3.2018
- Setiyanto A. 2013. Pendekatan dan implementasi pengembangan kawasan komoditas unggulan pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* [internet]. [diunduh 2019 Sep 8]; 31(2):171-195.

- Tersedia dari <http://www.ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/fae/article/view/3839/3187>
- Stufflebeam D. 1983. The CIPP model for program evaluation. *Evaluation Models. Evaluation in Education and Human Services* [internet]. [diunduh 2019 Nov 6] Tersedia dari https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-009-6669-7_7#citeas
- Stufflebeam D. 2015. CIPP evaluation model checklist: a tool for applying the CIPP model to assess projects and program. *Evaluation Checklist Project*. [internet]. [diunduh 2019 Nov 6] Michigan (US): Western Michigan University. Tersedia dari https://wmich.edu/sites/default/files/attachments/u1158/2019/cippmodel-stufflebeam_2019_04_17.pdf
- Suryana A, Agustian A. 2014. Analisis daya saing usahatani jagung di Indonesia. *Analisis Kebijakan Pertanian* [internet]. [diunduh 2020 Jun 30]. 12(2): 143-156. Tersedia dari <http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/akp/article/view/3862/3209>
- Susanti D, Listiana NH, Widayat T. 2016. Pengaruh umur petani, tingkat pendidikan dan luas lahan terhadap hasil produksi tanaman sembung. *Jurnal Tumbuhan Obat Indonesia* [internet]. [diunduh 2020 Mei 7]. Doi 10.22435/toi.v9i2.7848.75-82. Tersedia dari <https://www.researchgate.net/publication/324589330>
- Syahyuti. 2003. Alternatif konsep kelembagaan untuk penajaman operasionalisasi dalam penelitian sosiologi. *Forum Penelitian agro Ekonomi* [internet]; [diunduh 2020 Jun 6]. 21(2): 113-127. Tersedia dari <http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/fae/article/view/4154>
- Williamson OE. 2000. The New Institutional Economics : Taking Stock, Looking Ahead. *Journal of Economics Literature* [internet]; [diunduh pada 2020 Jun 19]. 38:595-613. Tersedia dari: www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jel.38.3.595
- Wulandari SE, Prajanti SDW. 2018. Strategy for youth interest enhancement as effort of agricultural revitalization in Klaten Regency. *Economics Development Analysis Journal* [Internet]; [diunduh 2020 Jun 20]; 7(12):224-234. Tersedia dari: <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>